

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Bustamin Kamaru¹
Sarah Sambiran²
Arpi Rondonuwu³

Abstract

Each region in Indonesia has a unique in terms of beauty and customs that exist in the area so as to attract tourists to visit it. To enhance the role of tourism, it is closely related among the goods in the form of own attractions that can be sold by means and infrastructure that support it related in the tourism industry. Enterprises to develop a tourist destination should pay attention to various factors that affect the existence of a tourist destination. North Sulawesi Province which used to have the nickname "*Torang Samua Basudara*" and now changed to "*Torang Samua Ciptaan Tuhan*". has four Municipalities and eleven Regencies, one of them is Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Currently, the management of tourist attraction in Bolaang Mongondow Utara Regency has not been well managed, such as management management is still not professional, lack of tourism activity, facilities and infrastructure is still inadequate, the process of providing information has not been organized or delivered properly. By looking at the situation is required a management role for the delivery of good information will be a tourist attraction in the District of North Bolaang Mongondow to the outside community to know and can enjoy the facilities provided in the attraction.

Keywords : Strategy, Local Government, North Bolaang Mongondow, Tourism Object

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan dan prioritas pengembangan bagi sejumlah Negara, terlebih bagi Negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan adanya daya tarik wisata cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya dan kehidupan masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan baik dari segi keindahannya maupun adat istiadat yang ada di daerah tersebut sehingga menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Untuk meningkatkan peran kepariwisataan, sangat terkait antara barang berupa obyek wisata sendiri yang dapat dijual dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya yang terkait dalam industri pariwisata. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata.

Bentuk upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan promosi yang lebih terencana dan teratur supaya promosi tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diinginkan, yaitu informasi tersampaikan dengan baik dan mudah sekaligus meningkatkan minat masyarakat luar maupun lokal untuk lebih mengenal objek wisata baik dengan cara langsung ataupun tidak. Serta memperbaiki dan menambahsarana dan prasarana guna kenyamanan para wisatawan, Karena hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar obyek wisata.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tentang Pembangunan

Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, pasal 8: (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. (2) pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta UU No 10 tahun 2009 tentang kawasan strategis (pasal 12:1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata). Untuk itu dengan semangat otonomi daerah yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat setempat, maka dalam rangka percepatan proses pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus benar-benar menagkap pelimpahan tugas dan wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dan memajukan masyarakat di daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan daerah dan mempunyai peranan cukup penting

dalam perekonomian baik sebagai sumber devisa atau pendapatan. Beberapa acuan normatif yang telah disusun untuk menunjang pengembangan kegiatan pariwisata daerah, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tinjauan Pustaka

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata *Pari* dan kata *Wisata*. Kata *Pari* berarti penuh, seluruh, atau semu dan kata *Wisata* berarti perjalanan. Gusti (2016:23). Glueck dan Jauch dalam Sedarmayanti (2014:2) mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Halim dalam Rasyad (2006:30) menjelaskan strategi adalah suatu cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan Bab 1 (ketentuan umum) pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seorang atau sekelompok orang dengan

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau perjalanan keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. (Gusti. 2016:37)

Menurut Oka A. Yoeti (2006:21) pariwisata adalah: "suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut." Murphy dalam Pitana dan Gayatri (2005:45) "Pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen." Menurut Spillane dalam Gusti (2016:24) pariwisata adalah suatu jasa dan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, usaha pariwisata dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: usaha jasa pariwisata, perusahaan obyek daya

Tarik wisata dan usaha sarana pariwisata.

Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya Tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait yang terdapat di bidang tersebut. Menurut Mac Intosh dalam Oka Yoeti (2008:9), pariwisata adalah sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, mulai dari interaksi antar wisatawan disatu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan yang dimaksud. Menurut Yoeti (2006:170), wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata seperti berikut:

1. Fasilitas transportasi
2. Fasilitas akomodasi,
3. Fasilitas Catering Service
4. Obyek dan atraksi wisata
5. Aktivitas rekreasi
6. Fasilitas pembelanjaan
7. Tempat atau toko

Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana

pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu:

- 1) Sarana Pokok Pariwisata (*Main Tourism Superstructures*) adalah: Hotel, Villa, Restoran.
- 2) Sarana Pelengkap Pariwisata (*Supplementing Tourism Superstructures*) adalah: wisata budaya dan wisata alam.
- 3) Sarana Penunjang Pariwisata (*Supporting Tourism Superstructures*) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.

Menurut Joyosuharto dalam Yoeti (2006:182), pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu: (1) menggalakkan ekonomi, (2) memelihara kepribadian bangsa & kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, (3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata; (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Demikianlah pandangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono 2009:11).

Fokus penelitian diarahkan pada Strategi Atau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Mengembangkan Objek Wisata yang meliputi Prioritas, Anggaran, dan Promosi.

- a. Prioritas pengelolaan pariwisata meliputi: pengadaan sarana dan prasarana pantai batu pinagut, air terjun desa pontak, dan berlangsungna pembangunan pesisir pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- b. Anggaran pengelolaan pariwisata meliputi: kunjungan wisatawan disetiap tempat wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengadakan kegiatan-kegiatan promosi lomba-lomba tarian kuliner, melalui Dinas Pariwisata.

- c. Promosi kepariwisataan meliputi : kegiatan pemilihan Boulo Vuyu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengadakan event-event tarian-tariang Kaidipang, Bolangitang, dan lainnya.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. informan dalam penelitian ini adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara, 1 kepala Dinas pariwisata, 1 Kepala Bidang Pariwisata, 1 Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi, 1 Kepala Bidang Kebudayaan, 1 Kepala Seksi Obyek Wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan 1 informan wisatawan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil-hasil wawancara yang diperoleh melalui informan, pada bagian ini peneliti akan membahas strategi pengelolaan kepariwisataan yang semestinya harus didukung oleh:

- a. Kebijakan Oprasional Kebijakan Obyek Dan Daya Tarik Wisata. Kebijakan oprasional yang dimaksud mencakup penetapan atas pusat-pusat wilayah pengembangan obyek atas dasar analisa struktur rencana tata ruang pengembangan kawasan pariwisata dengan memperhatikan usaha pengembangan fasilitas infra dan supra struktur, daya dukung lingkungan, serta nilai daya tarik obyek wisata unggulan yang dianggap memiliki karakteristik daya Tarik yang paling menonjol berdasarkan nilai atraktif yang dimiliki dan didukung fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.
- b. Kebijakan Operasional Pengembangan Sarana Wisata. Dalam kebijakan ini mencakup

penetapan keputusan mengenai klasifikasi hotel, penginapan dan rumah makan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan keputusan mengenai pengaturan pembentukan asosiasi hotel/penginapan dan rumah makan sebagai wadah pembinaan pengembangan usaha sarana wisata daerah, dan penetapan keputusan mengenai pembentukan tim pembina pengelola dan pengawasan pengembangan sarana usaha wisata daerah.

c. Kebijakan Oprasional Pengembangan Promosi Wisata Daerah. Hal-hal yang terkait dalam kebijakan iniantara lain mencakup penetapan keputusan mengenai pengaturan dalam pembentukan organisasi biro perjalanan wisata daerah, penetapan keputusan mengenai pengelolaan media promosi kepariwisataan daerah, penyelenggaraan pengembangan kegiatan atraksi wisata serta pengembangan pembinaan dan pelayanan pemasaran wisata daerah.

Dari rumusan kebijakan pengembangan kepariwisataan yang telah dikemukakan di atas maka pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan yang dilakukan, arah dan sarana pengembangannya dijabarkan sebagai berikut: Dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan program dan prioritas rencana pengembangan kepariwisataan secara terpadu antara instansi terkait, dengan didukung kemampuan aparaturnya dalam pelaksanaan tugas pengembangan penyelenggaraan urusan kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.

Pembinaan masyarakat asset pariwisata daerah perlu diarahkan pada

usaha untuk lebih memperkenalkan kekayaan budaya dengan tetap ditunjang sebagai usaha pengembangan atas obyek dan daya Tarik wisata dengan jalan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada setiap kawasan obyek wisata yang ada. Pengembang obyek dan daya Tarik wisata perlu diarahkan kepada penetapan obyek wisata andalan dengan didukung peningkatan mutu atas kondisi saran dan prasarana yang ada serta diikuti oleh upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka peningkatan atas sumber penerimaan daerah perlu diarahkan pada penyempurnaan dan pengkatan unsur bina wisata, pemasaran produk wisata serta penetapan peraturan daerah mengenai izin usaha dalam pengelolaan pada suatu kawasan wisata.

Titik berat bidang promosi wisata, melalui peningkatan mutu informasi, bimbingan dan pemasaran obyek wisata budaya, obyek wisata alam maupun obyek wisata minat khusus. Untuk mencapai peningkatan mutu dimaksud maka titik berat pengembangan bidang promosi wisata ini perlu didukung dengan polakerja sama terpadu antara pihak pemerintah daerah, swasta maupun satuan-satuan organisasi pengendalian dan pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Bagi Bolaang Mongondow Utara, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang dipandang mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat dijadikan modal bagi

pengembangan industri pariwisatanya. Salah satu tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Dalam orde reformasi ini, merupakan momentum awal yang sangat tepat bagi daerah untuk lebih mandiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemandirian daerah ini terwujud dalam pemberian kewenangan yang cukup besar meliputi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.

Penyerahan kewenangan tersebut disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Merupakan konsekuensi logis bagi daerah dengan adanya penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang bersifat operasional dilimpahkan kepada daerah. Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya, termasuk pembiayaan promosinya. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan,

pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dan dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dilihat dari sisi PAD maka ada beberapa daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sehingga tidak dapat mengandalkan PAD-nya dari hasil sumber daya alam. Oleh karenanya pengembangan industri pariwisata suatu daerah menjadi alasan utama sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD melalui pemamfaatan potensi-potensi daerah setempat. Pada tahun 1997, industri pariwisata Indonesia diperkirakan menghasilkan pajak tidak langsung sejumlah 8,7% dari keseluruhan nilai pajak tidak langsung dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 9,6% dari total keseluruhan. Data tersebut menunjukkan bahwa industri pariwisata Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar di bidang perpajakan.

Sektor pajak mempunyai peran penting dalam budget Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karenanya, kontribusi pajak bagi pembangunan diharapkan tidak saja mendorong pembangunan secara merata sampai daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut harus dilakukan secara bijaksana,

artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah selain sebagai sumber PAD, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah. Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya. Upaya pengembangan industri pariwisata Bolaang Mongondow Utara terutama dalam menghadapi otonomi daerah berkaitan erat dengan berbagai faktor. Oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor yang secara faktual berperang dalam pengembangan industri pariwisata khususnya di daerah-daerah, yaitu (Pendit Nyoman, 2005:33-35).

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah Human Resources development diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah.

Profesionalisme sumber daya manusia Indonesia merupakan suatu tuntutan dalam menghadapi persaingan global dimana sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai gagasan, inovasi dan etos kerja profesional. Tentu tidak mudah memperoleh tenaga-tenaga profesional di bidang pariwisata paling tidak harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kepariwisataan, sehingga pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di daerah-daerah tujuan wisata berpengaruh positif pada perkembangan industri pariwisata daerah.

b. Promosi Kepariwisata

Upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerah-daerah Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Pada abad 21, di mana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan dipasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata. Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik ditingkat internasional maupun regional. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia agar semakin meningkatkan promosi kepariwisataan. Adalah kenyataan pahit ketika industri pariwisata di Indonesia mengalami krisis mulai tahun 1997 sampai dengan memasuki tahun 2000 sebagai akibat

ketidak stabilan politik, sosial dan ekonomi. Merosotnya jumlah wisatawan di daerah-daerah tujuan wisata selama ini merupakan bukti bahwa situasi dan kondisi politik suatu negara berdampak pada terganggunya seluruh kegiatan kepariwisataan. Prospek industri pariwisata di tahun 2000 ini tergantung pada banyak faktor. Dalam hal ini aspek promosi merupakan salah satu faktor penentu pengembangan potensi pariwisata khususnya di daerah-daerah Indonesia, sehingga dapat dikatakan promosi memainkan peran kunci dalam kinerja masa mendatang industri pariwisata Indonesia.

c. Sarana dan Prasarana Kepariwisata

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai sarana dan prasarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi telah diterapkan, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar internasional.

Pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya Tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana di daerah tujuan wisata untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata. Sarana prasarana tempat merupakan unsur pokok dalam mata rantai kegiatan

industri pariwisata. Apabila pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan ditelantarkan akan berakibat pada tidak tercapainya dampak positif industri pariwisata dalam peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja dan sebagai pendorong pembangunan daerah. Ketiga faktor di atas merupakan faktor kritis yang perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pengembangan industri pariwisata daerah. Tujuan pengembangan industri pariwisata daerah dapat tercapai apabila ketiga faktor tersebut dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan, Hanya saja perlu disadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai industri memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terlebih dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, maka pola perencanaan yang terpadu mutlak diperlukan sebelum mulai dengan pengembangan industri pariwisata.

Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan obyek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata.
2. Promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. Respons dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di Pantai Batu Pinagut, dinilai lambat direspons oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Khususnya Dinas Pariwisata dimana sampai dengan saat ini belum dikelola secara khusus baik pemerintah maupun pihak swasta.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan menambah alokasi anggaran dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada, untuk menunjang pembangunan infrastruktur kepariwisataan, khususnya alokasi wisata Pantai Batu Pinagut
2. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, melalui Dinas Pariwisata perlu meningkatkan promosi kepariwisataan, bukan hanya melalui stiker, brosur, pamphlet, atau mengikuti pameran, tetapi lebih kepada promosi internasional untuk wisatawan mancanegara.
3. Perlu ditingkatkan respons pemerintah kabupaten dalam menyambut sikap positif masyarakat dalam mendukung dikembangkannya kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa Basuki, 2015, Kebijakan Pembangunan Kepariwisata. Intrans Publishing Malang
- Pitana I Gede, Gayatri G Putu, 2005. Sosiologi Pariwisata. C.V Andi Offset. Yogyakarta
- Sugiyono, 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung
- Utama I Gusti, 2016. Pengantar Industri Pariwisata. C.V Budi Utama. Yogyakarta
- Pendit Nyoman S. 2005. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar. Pradnya Paramita Jakarta.
- Rasyad, Azhar. 2006. Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif, Manajemen Strategik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Semiawan R. Conny 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Citarang
- Sedarmayanti. 2014. Manajemen Strategi. Refika Aditama. Bandung
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
- Yoeti A. Oka, 2006. Anatomi Pariwisata. Angkasa, Bandung
- Yoeti A. Oka, 2008. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Pradnya Paramita. Jakarta.